



# **Industrialization, Modernization and Cargo Cult of The Bintuni Bay**

**Andi Revelino Rumbiak**

*Universitas Cenderawasih Papua*

## **ABSTRACT**

*Artikel ini berusaha menggambarkan sejumlah gejala social yang terjadi pada etnik-etnik asli di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Papua dengan unit analisis khususnya pada penduduk asli di Teluk Bintuni, provinsi Papua Barat. Capaian pertumbuhan ekonomi yang bersumber pada eksploitasi sumber daya alam menjadi paradigma kebijakan pembangunan Negara melalui penetrasi industrialisasi dan ekonomi kapitalis di wilayah yang memiliki potensi kekayaan alam belakangan ini diyakini memberikan pengaruh pada perubahan-perubahan social kebudayaan pada entitas kecil kelompok kebudayaan minoritas dengan keberagaman yang mendiami wilayah tersebut dan menjadi salah satu factor pendorong terjadinya disorientasi antar unsur-unsur dalam kebudayaan asli setempat (indigenous cultures), salah satu yang paling nampak adalah gogalnya proses akulturasi oleh budaya asli (erring acculturation) terhadap pembudayaan melalui introduksi masuk nilai-nilai modernisasi dan industrialisasi. Dalam tulisan ini saya mencoba merangkai kerangka analisis, antara hubungan aspek-aspek tersebut dengan kemungkinan reaksi yang akan timbul melalui gejala khas yang ada dalam kebudayaan Papua-Melanesia dengan kembalinya suatu gerakan kebatinan yang sering terjadi dimasa lalu. Gerakan ini dilandasi oleh nilai spiritual-materialistik, factor-faktor inheren dari kebudayaan itu sendiri, bersumber pada folklore mengenai dongeng suci akan hadirnya suatu 'zaman bahagia' dan harapan yang bersumber pada nilai materialistik melalui 'paham cargo' yang di stimulasi oleh kontak budaya, interaksi antara kebudayaan asli dengan dunia modern akibat masuknya kepentingan-kepentingan kapitalis dan liberalisasi ekonomi di wilayah mereka.*

**Kata kunci :** industrialisasi, modernisasi, kontak budaya, perubahan, penduduk asli, cargoisme

## INTRODUCTION

Beberapa dasawarsa belakangan ini Teluk Bintuni dikenal sebagai salah satu kawasan strategis di Papua Barat karena sumber daya alam bernilai ekonomis tinggi terutama setelah masuknya perusahaan multi nasional seperti BP-LNG Tangguh yang mengelola 23,7 trilyun kaki kubik cadangan minyak dan gas alam yang mulai beroperasi pada awal 2002 hingga saat ini. Selain sector migas, sektor non migas seperti industri kayu, perkebunan dan komoditas tangkapan perairan pesisir juga menjadi produk unggulan yang menempatkan Kabupaten ini sebagai salah satu Kabupaten dengan peringkat pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Papua Barat. Pergerakan laju pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi belakangan ini cukup masif merambah hingga ke pelosok wilayah tersebut yang secara sosio-kultural menjadi wilayah ulayat komunitas-komunitas asli. Teluk Bintuni dikenal merupakan wilayah dengan hamparan luas ekologi berawa yang secara turun-temurun didiami oleh penduduk asli dengan ciri-ciri fisik Papua-Melanesoid yang secara etnolinguistik dapat di kelompokkan ke dalam sejumlah kelompok tradisional etnik yang berbeda-beda. Etnik dimaksud adalah etnik Sebyar, etnik Sough, etnik Moskona, etnik Wamesa, etnik Irarutu, etnik Sumuri dan etnik Kuri Masing-masing kelompok etnik memiliki bahasa sendiri dan mengokupasi wilayah teritorial tertentu sebagai wilayah kepemilikannya. Etnik-etnik tersebut secara administratif berada dalam wilayah yang membentuk bagian leher dari daerah Kepala Burung di Provinsi Papua Barat.

pergerakan Industrialisasi modernisasi dan akibat-akibat turunannya ini sebenarnya memunculkan harapan bagi pertumbuhan social ekonomi diwilayah

tersebut dan pada akhirnya akan menyejahterakan penduduk asli setempat. Namun, disisi lain disertai pula dengan sejumlah realitas yang mulai tampak dalam wujud ketimpangan maupun distorsi kebudayaan bagi kehidupan social budaya komunitas asli setempat yang semakin menggejala beberapa tahun belakangan ini. Tulisan ini merupakan kajian berbasis penelitian lapangan (Field study) yang mencoba fokus pada *setting* tertentu pada realitas riil sebuah fenomena mengenai bagaimana individu maupun kelompok sosio-kultural yang memiliki kekhasan di suatu wilayah, dalam memahami dunianya melalui peristiwa tertentu dalam sudut pandang mereka. Disisi lain Tulisan ini mencoba mengkonstruksi dan menginterpretasi dari sudut pandang etik penulis berkenaan dengan sebuah fenomena melalui gejala-gejala perubahan dalam lingkungan social, historis dan kultural pada kelompok-kelompok etnis asli yang mendiami wilayah tersebut.

Permasalahan yang tampak pada kelompok-kelompok kecil etnik asli khususnya yang telah di sebut diatas coba saya urai dalam beberapa isue penting, *pertama*; hilangnya asset-aset sosio-ekonomi dan kultural etnis asli, terdampak oleh eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam tambang antara lain minyak dan gas bumi juga komoditi di sector non migas yang merambah masuk kewilayah-wilayah yang secara tradisional merupakan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk asli *kedua*; dampak turunan dari kontak budaya melalui penetrasi migrasi masuk akibat pertumbuhan enklav-enklav etnik dan ekonomi di wilayah tersebut termasuk interaksi dan kontak budaya antar etnis pendatang dan penduduk asli termasuk factor-faktor ensternal yang mengubah

tatanan budaya penduduk asli baik sistem ide maupun unsur kebendaan (material) mereka. *ketiga*, seperangkat mekanisme survival (atau proses-proses cultural untuk mempertahankan diri) yang ada dalam internal kebudayaan asli yang muncul akibat unsure-unsur dari luar. Situasi ini akan saya rangkai dalam konteks pandangan lokal penduduk asli mengenai gerakan-gerakan *kebathinan* yang menjadi kekhasan dalam kebudayaan Papua-Melanesia yang sering disebut sebagai *cargo cult*.

## HISTORICAL BACKGROUND

Bila kita telusuri sejarah masuknya sejumlah perusahaan di wilayah Teluk Bintuni, bukannya tanpa masalah. Seperti halnya beberapa wilayah lainnya dipapua konflik-konflik kepentingan antara investasi global dan masyarakat adat mejadi sesuatu hal yang tidak dapat tehindarkan. Contoh yang dapat saya gambarkan misalnya Pada awal eksplorasi dan penjajakan yang dilakukan oleh perusahaan LNG-BP tangguh salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia, ada sejumlah, penolakan-penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat adat termasuk beberapa NGO yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Tambang melakukan advokasi terhadap penduduk asli, salah satunya dengan mengeluarkan pernyataan pers bahwa analisis dampak lingkungan LNG-BP Pertamina Tangguh tidak cukup berkualitas yang sebenarnya perlu dipertimbangkan kembali keluarnya ijin operasi oleh pemerintah. Muncul juga isu-isu mengenai kebakaran hutan sagu akibat kegiatan seismic, atau sejumlah tuduhan atas kematian pada anak yang terjadi akibat pencemaran lingkungan. Bahkan pada masa

itu dalam sebuah rapat dengar pendapat yang dilakukan di Manokwari, Decky Kawab seorang pemuka adat beretnis wamesa menyampaikan kecaman pedas atas janji perusahaan yang akan memperhatikan penuh penduduk asli sebagai kelompok masyarakat yang paling terdampak

*'industri minyak dan gas bumi bukan barang baru bagi kami. Kami sudah muak dengan dengan kebohongan orang-orang perusahaan perminyakan. Tidak perlu lagi janji-janji. Lakukan saja yang semestinya anda lakukan untuk rakyat' ( Sumule, 2006: 178);*

Keluhan-keluhan penduduk asli terdampak yang dialamatkan pada perusahaan multi nasional seperti British Petroleum-LNG Tangguh atau perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di wilayah tersebut, sebenarnya tidak terlepas dari akumulasi problem terdahulu yang dialami penduduk asli yang saling kait mengkait dengan issue-isue mengenai kerusakan hutan dan penguasaan wilayah ulayat milik etnik-etnik asli yang diubah menjadi areal konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan perkiraan luas keseluruhan kurang lebih 778.065 Ha.<sup>1</sup> Timbulnya gesekan kepentingan antara komunitas asli dengan kepentingan ekonomi Negara sebenarnya dapat ditelusuri sejak periode orde baru melalui terbitnya UU no 1/1967 yang menggunakan pendekatan terpusat dimana kendali pengelolaan sektor kehutanan dikendalikan sepenuhnya oleh negara dengan tujuan membantu invertasi dan izin investasi pada industri pengelolaan kehutanan. Periode selanjutnya dimulai setelah keruntuhan rezim soeharto pada tahun 1998, pada masa reformasi desentralisasi melalui otonomi daerah memunculkan, produk hukum UU kehutanan 41/1999 yang lebih banyak memberikan porsi kewenangan kepada

daerah untuk memberikan izin penggunaan hutan untuk tujuan industrial. Namun situasinya tidak berubah, hal ini tidak banyak membantu posisi komunitas asli untuk menjamin hak-hak mereka dasar dalam mengakses hutan dan sumberdaya yang ada (Iounela, 2002:54). Beberapa perusahaan kayu nasional Indonesia, seperti yang pernah tercatat adalah PT Youtefa Sarana Timber, Agoda Rimba Irian, TB Mina Agro Karya, Rimba Kayu Arthamas Atau Sagindo Sari Lestari yang merupakan perusahaan pengolahan sagu (*Metroxylon SP*) diperkirakan memiliki konsensi lahan seluas 15.000 hektar are yang berlokasi disekitar kampung tua *Tuanaikin* yang menjadi wilayah hutan adat milik etnis Sebyar. belakangan ini masuk perusahaan Bintuni Utama Wood Industri yang mengeksploitasi 137 hektar kawasan hutan bakau di wilayah pesisir sekitar Babo milik kelompok etnik Irarutu untuk dijadikan *pulp* bahan dasar industri kertas. Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit juga membuka usahanya di Wilayah Teluk Bintuni. Misalnya didaerah Tofoi hingga perbatasan kampung Aroba, wilayah dari beberapa klen kelompok etnik Simuri berbatasan dengan wilayah Etnik irarutu, dahulu merupakan bekas konsensi HPH milik Djayanti group kini peninggalan perusahaan yaitu lahan bekas *logging* dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 Ha milik Varita Group

Akumulasi factor eksternal antara eksploitasi sumberdaya alam, industrialisasi dan modernisasi juga berkelindan dengan factor-faktor turunan lainnya, salah satunya adalah migrasi masuk, Migrasi masuk di kawasan Teluk menjadi salah satu aspek penting dalam kajian ini berkaitan dengan kontak budaya dan perubahan sosio-ekonomi dan budaya penduduk asli di Teluk

Bintuni Dalam fase terakhir seperti yang dijabarkan diatas, terjadi migrasi masuk yang cukup besar, migrasi ini dapat dilihat dalam dua dimensi yaitu ; *ekstern* dan *intern* yang kerap disebut factor penarik (*pull factor*) yaitu; factor-faktor yang terdapat ditempat tujuan, sedangkan yang lainnya adalah factor pendorong (*push Faktor*) yaitu factor-faktor yang mendorong orang meninggalkan daerah asalnya (Lee,1979). Migrasi masuk dapat dikategorikan dalam dua kategori. *Pertama:* orang-orang yang masuk atas dasar kebijakan ekonomi-politik negara melalui program transmigrasi dan *kedua:* migrasi masuk yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh memanfaatkan dari peluang ekonomi karena terbukanya lapangan kerja atau terbentuknya kantong-kantong (*enclaves*) pertumbuhan ekonomi disekitar teluk. Proses ini secara timbal-balik membentuk pola tertentu berupa *enclaves ethnic*, suatu wilayah geografis yang ditempati oleh etnik tertentu, sering disebut konsentrasi etnik paling tinggi yang mempunyai karakteristik identitas budaya atau aktivitas ekonomi yang sama (Liliweri,2018). Mereka tersebar dalam sekat-sekat pemukiman tersendiri berdasarkan etnis. Polarisasi kaum pendatang biasanya menempati satuan-satuan pemukiman yang terintegrasi dengan wilayah pertanian yang dibentuk dalam rangka pemerataan penduduk melalui program transmigrasi<sup>2</sup>. Kaum pendatang lainnya<sup>3</sup> terkonsentrasi pada pusat ibukota kabupaten, distrik dan pasar-pasar yang mejadi wilayah mereka dalam berbagai usaha dibidang perniagaan. Sedangkan penduduk asli tetap berada di kampung-kampung tradisional mereka. pengelompokan ini membentuk pola-pola baru, segregasi batas sosial antara kelompok etnik pendatang dan orang Papua, antara

'kami' dan 'mereka' sekat sosial tersebut dipertegas lagi oleh simbol-simbol kebudayaan masing-masing etnis yang menyandarkan dinamika kelompok pada *group solidarity* atau *ethnic solidarity* dalam suasana pengelompokan yang terikat (*bonding group*). Masley menjelaskan ada kecenderungan bahwa para migran tersebut di ruang geografi yang sama atau berdekatan sehingga memudahkan mereka mengembangkan jaringan migrant melalui hubungan interpersonal, sistem ini memfasilitasi mereka bertukar sumberdaya dan pengetahuan. Kelompok-kelompok etnik ini juga memiliki karakteristik dalam ragam usaha ekonomi dan pada umumnya merupakan karakteristik yang dibawa dari daerah asal. usaha perniagaan, jasa dan pertanian merupakan hal yang lazim dilakukan oleh etnis pendatang.

#### CULTURAL INVOLUTION AND CHANGES THAT OCCUR

Sejumlah kenyataan yang terjadi belakangan ini memang tidak bisa menafikan pesatnya pembangunan di Kabupaten Teluk Bituni. Infrastruktur, fasilitas umum, mobilisasi barang dan jasa yang digerakkan pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar di prakarsai oleh pihak swasta namun, situasi ini tidak sepenuhnya memberikan keuntungan bagi kelompok etnik asli di kampung-kampung tradisional mereka. Geliat modernisasi dengan akselerasi pertumbuhan social-ekonomi dan demografi dalam kurun waktu relatif singkat memberikan sejumlah tekanan tertentu pada sistem social-ekonomi penduduk asli antara lain dapat kita lihat melalui tingkat kerapatan hubungan social (*density of social relation*) setelah masuknya sejumlah koorporasi. Mobilitas demografi melalui

Migrasi masuk yang tersegmentasi dalam kelompok-kelompok etnisitas tersebar hingga kewilayah-wilayah pelosok, berakibat pada persaingan-persaingan atas dasar penguasaan ekonomi yang menimbulkan sumber-sumber ketegangan baru dalam interaksi yang terbangun atas dasar kepentingan yang sama pada sumber-sumber yang terbatas. Paling tidak ada tiga sumber ketegangan setelah masuknya industrialisasi di Wilayah tersebut *pertama*; Terjadi tarik-menarik kepentingan ekonomi antara perusahaan yang menikmati sumberdaya alam dengan kepentingan masyarakat adat yang selama ini relatif kehilangan akses akan sumberdaya tersebut. *Kedua*; Terjadi tarik-menarik antara kepentingan ekonomi kaum pendatang (melalui migrasi masuk) dengan penduduk asli dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas termasuk akses kepada lapangan pekerjaan baik formal maupun informal. *Ketiga*; tarik-menarik antar etnis-etnis asli pemilik ulayat atas batas kewilayahan yang semakin terbatas dan perubahan orientasi melalui kapitalisasi tanah.

Pengambil-alihan dan perubahan fungsi dan nilai tanah milik komunitas-komunitas asli terutama oleh kepentingan investasi menjadi factor yang mempengaruhi hak-hak mereka. Sejumlah tempat penting seperti hutan<sup>4</sup>, sumber air, sejumlah areal sacral atau menyangkut berbagai Kepentingan komunal yang bersifat material maupun spiritual di alih-kelolakan untuk kepentingan investasi dan pada akhirnya tanah dan segala sesuatu yang berada diatasnya memperoleh muatan nilai baru melalui kalkulasi ekonomis dan asset produksi yang menjadi dasar nilai kapitalisme. Hal ini sangat bertolak

belakang dengan prespektif local, pada hakekatnya tanah tidak di pandang sebagai komoditas pasar atau sebagai sarana produksi berorientasi laba. Tanah merupakan simbol Identitas, pandangan hidup, tempat mereka memahami dunianya. Nilai tanah tidak sekedar sebuah kegiatan ekonomi namun jati diri yang terintegrasi dengan sentimen-sentimen sosial, historis dan spiritualis karena tanah adalah 'ibu' sebuah pangkalan 'simbolik' bagi keberadaan suatu komunitas beserta kebudayaannya. Dalam sudut pandang ekonomi tradisional, tanah adalah bagian alokasi dan investasi sumber daya yang dibangun timbale-balik atas dasar relasi kekerabatan melalui hubungan pertukaran yang terhubung holistik dengan unsur-unsur lainnya. Gejala ekologis yang paling awal dari dampak industrialisasi dalam kebudayaan setempat adalah mulai hilangnya sumber-sumber penting yang sewaktu-waktu dapat mereka kelola semisal, dusun sagu, hutan adat, dan areal perburuan baik di wilayah pedalaman teluk maupun wilayah perairan pantai. Salah satu contoh kasus yang dapat kita analisa adalah saat pengambil-alihan beberapa kampung tradisional untuk kepentingan alokasi asset-aset perusahaan<sup>5</sup> yang dilakukan BP-LNG Tangguh pada sejumlah kampung tradisional etnis Sumuri yang dimukimkan kembali pada pemukiman baru yang lebih modern dengan sepetak lahan pertanian bagi tiap keluarga inti yang bertujuan merekayasa melalui akselerasi program model inkubator atau pemolaan (*patterning*) pada kelompok lokal dalam rangka menginkubasi sistem mata pencaharian meramu mereka menuju sistem pertanian intensif. Model rekayasa social seperti ini memicu munculnya dua permasalahan mendasar. *pertama*; Pemindahan ini sangat mempengaruhi pola

social-ekonomi tradisional penduduk sebab, secara kultural penduduk Sumuri adalah masyarakat yang memiliki tipikal berburu-meramu dengan mobilitas yang sangat tergantung pada sumber-sumber penting mereka dengan kampung tradisional yang selalu terintegrasi dengan sebaran sumber-sumber ekonomi disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sedangkan skala pemukiman baru tersebut tidak memiliki daya dukung geografis dengan sumberdaya yang memadai dalam prespektif tradisional yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut termasuk daya jangkauan pemenuhan kebutuhan dasar yang sulit dilakukan karena terletak jauh di kampung lama mereka atau memang telah berubah fungsi menjadi areal industry. *kedua*; *resettlement* tersebut juga mempengaruhi pola hubungan interaksi antar penduduk asli sebab, pola *resettlement* yang sering dipakai oleh korporasi sebagai bentuk *Corporate Social Respasibility (CSR)* , termasuk model jaminan social yang diberikan oleh korporasi kepada penduduk asli berakibat pada ketergantungan dan rendahnya mobilitas penduduk yang berakibat terjadi peningkatan jumlah penduduk dalam ruang geografis yang terbatas (dalam kampung-kampung baru mereka). Pertumbuhan penduduk ini memicu sumber ketegangan baru yang terjadi antar klen didalam kampung maupun dengan komunitas tetangga dalam etnis atau klen-klen yang berbeda, diakibatkan oleh tingkat kerapatan hubungan social (*density of social relation*) berkolerasi dengan kemampuan daya dukung lingkungan yang rendah Potensi konflik yang akan muncul adalah apabila kepadatan penduduk melampaui batas kemungkinan daya dukung ruang dalam wilayah ulayat masing masing klen, ketegangan-ketegangan dan konflik antar

klen baik dalam kampung maupun antar kampung bisa saja terjadi yang berkaitan dengan tanah dan wilayah ulayat mereka akibat dari perebutan sumberdaya yang mulai terbatas pula. situasi ini menyebabkan renggangnya kohesi social dalam kekerabatan mereka. gambaran ini dapat kita lihat dari keluh-kesah yang diungkapkan Marthen Sodefa

'kami tinggal disini seperti tinggal di sangkar emas. orang lihat hidup kami enak karena tinggal di rumah bagus yang diberikan perusahaan tapi kenyataannya dapur dibelakang tidak ada yang dapat dimasak'.

Sejumlah konflik pun semakin luas sebarannya, tidak hanya terjadi antara penduduk asli dan perusahaan atau bahkan mulai terjadi antar etnik asli atau antara kelompok-kelompok klen didalam etnik, misalnya menurut penuturan Abdul solichin coordinator Wilayah Pengorganisasian Kawasan Teluk Bintuni PERDU Papua,

'kini konflik social tata batas wilayah dan status kepemilikan hak ulayat tanah adat, telah mencapai 11 kasus. Yang bahkan terjadi antar penduduk local. konflik itu hingga kini belum diselesaikan secara baik, apakah pemerintah atau lembaga adat, selain itu dengan masuknya perusahaan (HPH) maupun pertambangan juga berdampak pada ketergantungan masyarakat local terhadap perusahaan, dalam hal ini soal konteks kemandiriannya masyarakat jadi mati' (kutipan dari suara perempuan Papua, 2008)

Disisi lain karakteristik budaya industry yang di transmisikan masuk dalam kultur tradisional khas yang dimiliki jelas tidak menguntungkan bagi penduduk asli. Mereka dengan skill yang tidak sesuai ditambah model etos kerja pra-industri yang memiliki corak berbeda khas masyarakat berburu-meramu harus berkompetisi dengan kegigihan dan keuletan kaum pendatang yang lahir dalam budaya 'pasar' dengan

keterampilan yang mereka miliki dan kekuatan modal sosial lewat jaringan-jaringan kekerabatan atau pertemanan yang terbangun antar mereka dalam merebut sumber-sumber ekonomi. Prinsip kapitalis yang dibawa oleh kaum pendatang dipandang berbeda dengan mentalitas ekonomi tradisional yang tidak terbangun atas dasar stratifikasi ekonomi dalam prinsip-prinsip ekonomi tradisional. Instrument penting dalam dunia kapitalis antara lain institusi pasar (*market institutions*) seperti koperasi, pinjaman/kredit usaha, bunga, laba dan perbankan asing bagi penduduk asli dengan karakteristik pola ekonomi nafkah (*subsistence economic*) yang memang jauh dari sistem ekonomi pasar diperhadapkan dengan agresivitas kapitalis global dan etnis-etnis pendatang sebagai "petarung" lain yang telah siap memperebutkan sumber-sumber daya alam yang ada termasuk kesiapan mereka memasuki serapan lapangan kerja dengan bermacam prasyarat formal termasuk tata-aturan kepatuhan dan tingkat kedisiplinan yang merupakan produk khas budaya modern. Aturan-aturan ini tidak memberikan banyak ruang pada karakteristik individu yang orientasi waktu mereka terikat pada aktivitas-aktivitas tradisional mereka seperti upacara-upacara siklus hidup, berburu, meramu sugu atau relasi dalam peran sosial mereka dalam masyarakat dan hubungan-hubungan dalam kekerabatan yang 'menyita banyak waktu' situasi ini mempertegas konsep yang dibangun oleh liliweri (2018) bahwa; (1) bila dalam suatu masyarakat terjadi ketidak seimbangan etnik, maka disini akan mudah ditemukan berbagai kasus dominasi dan eksploitasi (2) perilaku eksploitatif dari kelompok migran dimungkinkan karena mereka memiliki keterampilan dan tingkat

kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan kelompok minoritas sehingga terjadi hubungan yang eksploratif (3) terjadi dorongan yang kuat dari kelompok imigran untuk memasuki wilayah geografis dan social dari penduduk asli (4) asimilasi (atau amalgamasi) sebagai bentuk relasi antar etnik dimanfaatkan dalam perspektif penguasaan ekonomi, dimana asimilasi (amalgamasi) digunakan sebagai sarana untuk kepentingan-kepentingan penguasaan asset-aset ekonomi tradisional milik penduduk asli.

Penguasaan tanah dan sumberdaya alam juga dapat kita analisis melalui Modernisasi dan peran negara melalui paradigma pembangunan sentralistik dalam penyeragaman sistem administrasi pemerintahan hingga setingkat kampung termasuk birokratisasi kampung-kampung tradisional dan lembaga-lembaga adat sebagai perpanjangan tangan atas kontrol negara ikut memberikan sumbangan pada tereduksinya modal sosial pranata politik setempat yang secara tradisional lebih mengakar di masyarakat. Misalnya dengan penerapan undang-undang pemerintahan desa 1979 atau pembentukan lembaga musyawarah adat (LMA). Sub-proses modernisasi yang tanpa disadari 'membajak' tatanan asli yang sudah ada. Ikatan lokalitas kesatuan komunitas termasuk Struktur social politik tradisional didalamnya dengan sifatnya yang egaliter harus bersinggungan dengan bentuk struktur baru<sup>6</sup> dimana sistem kekuasaan segmenter yang memiliki banyak pusat (desentralisasi) utamanya dalam klen 'petuanan'<sup>7</sup> yang otonom dan dapat menjamin kohesi yang merujuk pada kekuasaan yang 'memimpin dalam harmoni kosmis' (Balandier, 1986:141). harus melakukan penyesuaian pada proses

homogenisasi birokrasi yang sentralistik. Kesatuan-kesatuan komunitas dalam kampung termodifikasi dalam Perjenjangan melalui kekuatan social yang cenderung menuju penyeragaman ide melalui pranata modern menghadirkan figur-figur pemimpin baru dengan struktur dan hierarki melalui otoritas tunggal dan cenderung mereduksi partisipasi individu dalam klen, kaitannya dengan peran serta mereka dalam menentukan semua keputusan termasuk loyalitas dan kerja sama yang diberikan secara sukarela karena setiap orang dipandang sebagai bagian dari unit politik yang terintegrasi dengan unsure-unsur budaya lainnya. Upaya birokratisasi oleh Negara ini justru melahirkan 'raja-raja kecil' yang ditransformasikan dalam wujud 'kepala suku atau dewan adat' mendorong bentuk individualisasi jabatan pimpinan dalam tatanan kesukuan (yang sebelumnya kolektif) dan justru mengukuhkan nilai-nilai 'feodal' struktur social khas kolonial eropa yang juga nampak pada praktek-praktek feodalisme kerajaan pra-kolonial pada penguasaan tanah di Pulau Jawa masa lalu. Kini, elit-elit local suku tersebut dengan otoritas tunggal meminjam legitimasi negara bertransformasi menjadi 'tuan tanah' dimana mereka menggunakan legitimasi tersebut dan mentautkan modal social-sumber daya sebagai 'alat negosiasi' dengan kepentingan investasi global dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan terutama kepentingan ekonomi melalui klaim penguasaan dan alokasi atas aset-aset milik komunal khususnya tanah dan sumberdaya alam diatasnya demi kepentingan pribadi, klenya atau lingkaran kelompok kepentingan lainnya. Konflik-konflik sengketa ulayat dan penguasaan sumberdaya alam dewasa ini banyak bersumber pada situasi ini melalui peranan Negara yang ikut

andil dalam mengintroduksi struktur social baru yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah ada, memicu oligarki antara elit-elit local suku sebagai agen (*broker*), koorporasi atau swasta yang mewakili pemodal (kepentingan kapitalis) dan oknum pejabat

pemerintah di tingkat local maupun pusat yang mewakili kekuasaan negara membentuk jaringan kongsi 'pemburu rente' yang beroperasi diatas pusran penguasaan tanah dan sumberdaya alam milik penduduk asli.

kekuasaan tradisional segmenter Desentralisasi kekuasaan → pertukaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum timbal balik</li> <li>• konsensus</li> <li>• egaliter</li> </ul>
kekuasaan Feodalisme Setralistik kekuasaan → kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak timbal balik</li> <li>• Totalitarian/kepatuhan</li> <li>• Berjenjang/struktur</li> </ul>

Bagan 1. Perbandingan Politik local dan sistem politik Negara yang bercirikan feodalistik-Totalitarianisme

Makin lemahnya institusi tradisional dan tecerabutnya unsure-unsur budaya asli dibarengi dengan masuknya nilai-nilai baru menyebabkan pergeseran orientasi nilai tradisional pada simbol-simbol status baru. Salah satu yang paling nyata adalah meningkatnya keinginan dan kebutuhan dalam pemenuhan simbol status tersebut yang terjadi setelah terjadi kontak-kontak kebudayaan. Nilai-nilai yang dikomodifikasi terbentuk strata sosial melalui Uang dan produk industri menjadi "kebutuhan" baru bagi penduduk asli yang menyebabkan pergerakan kapitalisasi tanah ulayat dan aset-aset penting dalam pemenuhan kebutuhan baru mereka. Dengan karakteristik khas berburu-meramu melalui gaya hidup konsumtif atau produktif-konsumtif yang memenuhi kebutuhan secepat mungkin yaitu pada hari yang sama dengan Pemuasan yang tidak ditunda-tunda (*straight course*) yang menjadi dasar pembentuk kepribadian tipikal (kepribadian kolektif) menjadi katalisator bagi semakin cepatnya distorsi antara nilai lama dan nilai baru melalui sejumlah kepentingan yang

masuk melalui industrialisasi dan modernisasi. Situasi ini dapat menjelaskan bagaimana kepribadian kolektif yang terbentuk memiliki sifat yang sangat cair dan adaptif melalui pranata social yang dimilikinya saat menghadapi perubahan lingkungan sosial. Mengutip dari pemikiran Erich Fromm, Hal ini menjelaskan bahwa kepribadian tipikal selalu terhubung dengan kebutuhan 'obyektif' yang dihadapi oleh suatu masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara efektif suatu masyarakat perlu menterjemahkannya kedalam unsure-unsur kepribadian dari individu anggotanya. (Fromm, 1949 ; Danandjaja 1988). Namun disisi lain proses adaptasi yang tidak sempurna akibat terlampauinya batas daya dukung sebuah kebudayaan dalam menghadapi perubahan secara cepat menyebabkan goncangan dalam masyarakat tersebut. dalam kasus-kasus yang terjadi orientasi nilai tradisional penduduk asli tidak benar-benar hilang, menampilkan komodifikasi bentuk-bentuk perilaku yang sama namun dengan obyek yang berbeda. penduduk asli seringkali

menampilkan sikap fatalistic yang memberikan gambaran pada kita mengenai goncangan pada pranata social mereka. Gaya hidup dengan pemuasan langsung mengarah pada gaya hidup hedonis, penggunaan sumber-sumber ekonomi secara langsung tanpa memikirkan kerugian yang terjadi kemudian atau bentuk investasi yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Pada kasus tertentu sikap-sikap yang menampakkan uforia yang berlebihan dalam penghamburan uang perilaku berfoya-foya, konsumtif pada kebutuhan tersier atau saluran lain melalui minuman keras dan prostitusi<sup>8</sup> sering diasumsikan juga sebagai konfigurasi dari struktur kepribadian rata-rata (*modal personality structure*) khas yang terbentuk dalam struktur kebudayaan yang 'cair' tetapi dalam asumsi lain merupakan bentuk adaptasi yang 'keliru' akibat tekanan-tekanan eksternal terhadap struktur budaya asli yang termanifestasi lewat perilaku kelompok oleh karena perubahan yang terjadi secara radikal dalam kebudayaannya. Dalam mencermati kondisi ini, dengan hati-hati saya coba berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi pada penduduk asli antara lain merupakan efek domino dari determinasi kausalitas aspek-aspek structural melalui paradigma pembangunan politik maupun social-ekonomi yang menjadi kebijakan negara yang berusaha ditransplantasikan pada komunitas-komunitas tradisional setempat (antara lain melalui penetrasi industrialisasi, modernisasi dan migrasi masuk) dan dihantar oleh factor-factor yang melekat dalam kebudayaan itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh factor inheren dari sebuah kebudayaan pasti termanifestasi pada pola perilaku yang mewakili satu karakter budaya, Tetapi dalam menyikapi soal ini, saya juga kurang sepakat

dengan para analis sosial (baik pemerintah maupun NGO) dalam studi-studi tentang pembangunan Papua yang seringkali kurang tepat mengoperasionalkan pemikiran James C. Scott termasuk pengaruh dari kajian yang dibuat oleh Kluckhohn dan Strodtbeck melalui teori-teori mengenai defisiensi kebudayaan yang dipakai dan menjadi satu-satunya alat membuat generalisasi subyektif yang terlalu simplifikasi dalam menilai kegagalan berbagai program pembangunan di Papua dengan memberi penekanan satu arah pada *stereotype* karakteristik penduduk asli sebagai bentuk dari kemiskinan cultural (*culture of poverty*) melalui; habitus, rendahnya mentalitas (*low mentality*) atau minimnya modal social (*social capital*). Hal ini menunjukkan kurang netralnya pijakan analisis studi-studi pembangunan di Papua dalam mengidentifikasi konteks relativitas kebudayaan, yang (tanpa) sengaja mereproduksi simbol-simbol dominasi kebudayaan melalui 'imperialisme ilmu-pengetahuan' yang berlindung dibalik kebenaran ilmiah. Sejumlah kritik pernah diungkapkan, salah satunya oleh Peter L. Berger, bahwa proses 'penyadaran', 'pembudayaan' 'memanusiakan manusia' yang sering kita dengar dalam semboyan atau jargon pembangunan yang dilakukan pada komunitas minoritas adalah suatu bentuk kesombongan tersendiri yang dilegitimasi oleh ilmu pengetahuan.

#### INEQUALITY IN CULTURAL CONTACT

Masuknya industrialisasi, modernisasi dan dibarengi dengan migrasi masuk tidak terlepas dari upaya kita memahami bagaimana interaksi penduduk asli Papua dengan dunia luar, termasuk persepsi yang terbangun dalam kontak

antara dua kebudayaan, yang membentuk cara pandang orang papua terhadap budaya lain yang masuk atau pandangan dunia luar pada orang Papua. Proses ini sebenarnya dapat kita telusuri melalui pendekatan historis, sejarah interaksi yang terjadi pada masa lalu sebagai pijakan untuk menghantar kita pada sudut pandang penduduk asli saat ini. Fans Capetti seorang kepala *onderafdeling* (jabatan setingkat di atas distrik) di bagian Selatan Papua pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah memberikan penilaian berkaitan dengan interaksi penduduk luar papua yang diangkat menjadi pegawai-pegawai pemerintahan Belanda dengan penduduk asli pada masa lalu :

'Masyarakat (dari etnis pendatang tertentu) mengenal stratifikasi social yang ketat, dibedakan antara semacam aristokrasi orang biasa dan budak. Meskipun kelas budak secara formal telah dihapuskan, pola hubungan asli yang berkaitan dengan itu di Nugini-Belanda (Papua) masih berjalan terus, biasanya orang Papua mula-mula disamakan dengan kelas social terendah (lihat Schoorl 1993, 21-23).'

Meskipun bukan satu-satunya, contoh ini dapat di pakai melihat pola interaksi yang dibangun dalam kerangka stratifikasi etnik yang berbeda pada awal kontak budaya. corak aristokratik khususnya pada penduduk dibagian barat Pulau Papua membentuk gagasan kolektif yang mengidentifikasi 'kita' (mayoritas) sebagai entitas yang berbeda dengan 'mereka' (minoritas). Dari identifikasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi yang dibangun dalam pola interaksi memungkinkan sebuah kebudayaan dominan memiliki daya pendorong yang kuat dalam arena kekuasaan dengan cara membangun hierarki secara kultural, politis maupun posisi tekstual dengan pembudayaan sejumlah tatanan baru pada kebudayaan lain termasuk kepada serpihan-

serpihan kecil kebudayaan asli (Papua) yang 'rentan' ini. Pengaruh kontak budaya tidak bisa kita amati sepenggal dan dari sumber-sumber kekinian saja, akibat dan pengaruhnya pada pada saat ini dapat kita telusuri pada sumber-sumber di masa lalu yang menjadi factor pengubah pada banyak kebudayaan-kebudayaan minoritas tradisional dimana, penduduk asli berintraksi dengan karakteristik yang terdapat dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial yang berbeda. Bahkan apa yang menjadi penilaian Capetti dalam sudut pandang lain, telah memberi petunjuk, sejarah masa lalu masuknya pengaruh kapitalisme tradisional dan imperialisme tradisional oleh bangsa-bangsa dari luar melalui pertukaran-pertukaran benda material sistem teknologi termasuk perdagangan manusia di sepanjang pesisir Papua dan diadopsi oleh sebagian besar suku-suku pesisir Papua, sehingga memunculkan sejarah traumatis atas konflik-konflik penculikan dan perdagangan budak di antara penduduk asli sendiri. Gagasan kolektif dalam sikap superioritas juga nampak bila kita telisik dari akar *raciolinguistic* dalam penyebutan 'Papua' (puah-puah) untuk menamai kelompok-kelompok etnis yang berada di pulau papua yang berarti 'berambut keriting', termasuk menyematkan 'label' tertentu pada kekhasan karakteristik fisik. Hal ini tidak terlepas dari situasi pada saat itu dimana, bentuk dari supremasi ras kelompok dominan dibangun dalam konteks tekstual atau bagaimana bahasa digunakan untuk membangun *framing* tentang ras dan bagaimana gagasan bahasa mempengaruhi ras, secara tekstual dimana, ras dilihat sebagai konstruksi social bukan sebagai kosntruksi biologis yang mempunyai pengaruh yang besar dalam membangun definisi social terhadap satu ras

tertentu melalui penamaan konotatif kepada sekelompok etnis berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimilikinya yang sangat terkait dengan stigma inferioritas, primitivisme dan perbudakan pada saat itu. Namun, pada situasi yang sama relasi antar budaya ini tetap terjalin sebab, penduduk asli secara pragmatis juga terikat pada kepentingan-kepentingannya sendiri dan berusaha mendapatkan karakteristik umum yang terdapat dalam kebudayaan yang dianggap lebih maju (superior) atau dorongan pemenuhan kebutuhan 'obyektif' mereka melalui hubungan kepentingan atas pertukaran-pertukaran ekonomi dan benda-benda material pada masa itu. pengaruh interaksi pada masa lalu ini dapat kita pakai sebagai basis analisis pada situasi kekinian yang tanpa disadari menjadi dasar proses-proses sosial pada hubungan interpersonal antar etnis yang menempatkan batas-batas budaya melalui simbol-simbol tertentu yang disematkan pada etnik-etnik dengan corak kebudayaan tradisional dalam prespektif subyektif. Sudut pandang kebijakan negara pun seringkali abai atau mungkin memiliki sudut pandang yang bias dalam memahami permasalahan-permasalahan cultural yang marak terjadi. Situasi ini juga diperparah oleh kurang jelinya negara melihat ketimpangan-ketimpangan struktural, marginalisasi yang dialami oleh komunitas adat setempat yang tak terselesaikan karena eksploitasi sumberdaya alam akibat masuknya industrialisasi dan modernisasi.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, kita perlu memperbandingkan situasi masa lalu dan saat ini. Bila kita membandingkan situasi yang terjadi pada saat ini sebenarnya menunjukkan karakteristik yang serupa. ( Lyman, 1968; Liliweri 2018) pernah mengemukakan

bahwa migrasi keluar orang-orang Eropa dapat dipandang sebagai katalisator bagi reorganisasi masyarakat diseluruh dunia. Menurutnya reorganisasi ini terjadi melalui kontak yang teratur dalam beberapa tahapan antara imigran dengan penduduk asli setempat (*race relations circle*). Kini, kontak budaya melalui industrialisasi dan modernisasi tetap memunculkan kontraksi yang sama pada kebudayaan asli menghasilkan bentuk perilaku komunal dengan memunculkan sikap-sikap imitatif berlandaskan kebutuhan 'obyektif kekinian' dalam mengisi kekosongan pada unsur-unsur tertentu pada kebudayaannya melalui nilai-nilai baru yang ingin di adopsi kedalam kebudayaan mereka '*Kita ingin seperti mereka*' namun merekapun hanya mengambil melalui unsur-unsur untuk menjawab kebutuhan praktis yang bersifat materialistik, sedangkan orientasi nilai budaya sebenarnya tetap sama dan tidak terintegrasi secara menyeluruh dalam kebudayaannya. Namun, disisi lain karakteristik aristokratik memunculkan Penolakan dari penduduk asli yang tidak mengenal prinsip-prinsip tersebut, Penolakan ini bersumber pada bentuk-bentuk '*kekerasan simbolik*' relasi yang dibangun atas dasar hierarki dan dominasi melalui sikap-sikap superior '*mereka tidak seperti kita*'. Terbangun hierarki melalui dominasi ekonomi dan hegemoni budaya dalam pola interaksi antar satu kebudayaan dengan pola stratifikasi social (budaya mayoritas) terhadap kebudayaan lainnya yang lebih egalitarian (budaya asli) yang digolongkan berdasarkan *stereotype* tertentu yang membentuk pengelompokan sosial (atau etnis) dan salah satu golongan ditempatkan dalam kelas social lebih rendah dari lainnya. Hal tersebut dapat memberikan tambahan muatan analisis kepada kita dalam

melihat pola hubungan dalam interaksi penduduk asli dalam kontak budaya yang terjadi. Ada proses akulturasi yang berjalan secara keliru (*erring aculturation*) dalam kontak-kontak kebudayaan awal maupun yang terjadi saat ini. Walaupun paradigma konflik terlihat menarik sebagai bangunan analisis dalam melihat situasi ini namun kita tidak dapat menggunakan sepenuhnya pendekatan tersebut sebagai satu-satunya piranti analisis sebab, relasi sosial yang terbangun juga melibatkan prinsip-prinsip pertukaran, saling membutuhkan antar kedua belah pihak termasuk, sifat oportunistik, mengambil 'keuntungan tertentu' yang diperankan oleh kebudayaan asli dalam aspek-aspek obyektif-subyektif mereka akibat cairnya struktur sosial yang dimilikinya. Saya mencermati ada kecenderungan terbangun bentuk relasi yang bersifat semu (*pura-pura*) yang berlandaskan kepentingan-kepentingan pertukaran semata diantara penerimaan maupun penolakan oleh penduduk asli yang kadang membingungkan dalam interaksi kontak kebudayaan yang memacu kita dalam memikirkan segala kemungkinan teoritis, termasuk pengaruh gagalnya akulturasi dalam kontak budaya yang terjadi pada masa lalu hingga saat ini.

Bertautan dengan tema pokok kita mengenai penduduk asli di Teluk Bintuni, beberapa tanggapan yang disampaikan oleh penduduk asli mungkin dapat memberikan konfirmasi mengenai penilaian-penilaian mereka sendiri terhadap perubahan akibat kontak budaya, marginalisasi dan 'hegemoni budaya' seiring industrialisasi dan modernisasi pada masa kini di Teluk Bintuni. Menghadapi situasi yang terjadi, Penduduk asli nampak membangun corak interaksi bersifat bipolar (dua kutub) melalui gambaran sejumlah sikap penolakan

terhadap hegemoni budaya superioritas atau dominasi ekonomi namun, disisi lain juga nampak sikap-sikap kompromistis '*kita ingin seperti mereka*' pada situasi lainnya. Kadang sikap menolak dan kompromi muncul silih berganti dalam sejumlah pernyataan. Sebagai contoh misalnya, seorang pemuka adat dengan semangat berapi-api menjelaskan dampak negatif yang terjadi dengan hadirnya sebuah perusahaan, namun dalam kesempatan lain, tokoh tersebut yang awalnya berdiri terdepan dalam menolak hadirnya perusahaan bisa secara tiba-tiba menjadi orang yang paling permisif terhadap kehadiran perusahaan lainnya.

Sikap ini tergambar dari hasil wawancara kami terhadap bapak Hasan Manuama seorang pemuka adat etnis Iirarutu di Babo :

'Orang Babo (etnis Iirarutu) sudah merasakan dampak hancurnya kehidupan (komunitas) kami dengan masuknya perusahaan dan pendatang di wilayah kami, kenyataannya selama ini kami orang-orang di Babo merasa kurang diperhatikan perusahaan-perusahaan besar (perusahaan Minyak dan Gas) tampak didepan mata kami tetapi kami tidak merasakan manfaatnya, kapal-kapal asing mereka hanya singgah dan pergi mengambil kekayaan di tanah kami padahal kami seluruh orang teluk Bintuni seharusnya harus ikut merasakan manfaatnya, tidak hanya kampung-kampung yang berada dekat perusahaan saja. Walaupun mereka juga sekarang susah karena perusahaan mengambil hutan, dusun dan tempat berburu mereka Coba anda lihat, kampung di Babo sini dahulu disebut Surabaya kedua, (maksudnya sudah ramai seperti kota-kota di pulau Jawa), banyak orang masuk dari mana-mana dan banyak barang dari luar yang masuk ke sini tetapi kehidupan kami begini-begitu saja (tidak berubah). Sekarang kami banyak berharap kepada PT (xx) yang bergerak di bidang kayu, sepertinya mereka orang baik, kami sudah buat perjanjian dengan mereka menebang hutan bakau di wilayah ulayat kami. Mereka butuh kayu dan kami butuh barang, mungkin kita dapat bekerja sama'

#### SEEDLINGS OF CARGOISM ?

Apakah pola interaksi penduduk asli dan masuknya nilai-nilai baru dapat kita

tautkan dengan sebuah gerakan khas penduduk Melanesia yang sering disebut cargo cult?. Ada fakta-fakta yang menarik perhatian saya kaitannya dengan kargoisme bahwa, interaksi melalui kontak budaya bersama industrialisasi dan modernisasi secara luas di Kabupaten Teluk Bintuni juga hadirnya model interaksi yang bersifat bipolar (semu) oleh komunitas asli yang melatar belakangi penerimaan mereka perlu dijelaskan melalui factor inheren dari kebudayaan itu sendiri. munculnya harapan yang bersifat materialistik yang mewakili karakteristik tradisional dalam kebudayaan Papua-Melanesia dengan cara menyerap unsur-unsur 'praktis' dari luar yang bila dikaitannya dengan kargoisme adalah, dimana pada tahap-tahap tertentu harapan tersebut membutuhkan 'katalisator' yang hanya bisa terkoneksi melalui nilai-nilai spiritualis dalam dongeng suci (sacral) yang mewakili pandangan asli setempat sebagai wadah dan cara yang paling 'masuk akal' strategi adaptasi dari sebuah kebudayaan dalam memahami gejala dan gejala yang muncul dalam interaksi dua kebudayaannya dan akibat perubahan yang terjadi karena kontak budaya. Hal ini sebenarnya menunjukkan karakter pragmatis penduduk asli dalam menyelaraskan unsur-unsur materialistik (profan) di satu sisi namun juga unsur spiritualis (sakral) disisi lainnya.

Bila ditelusuri lebih jauh rupanya nuansa kargoisme juga Nampak dalam sejumlah mitologi bagi orang di daerah Teluk Bintuni dan masih mempunyai pengaruh hingga kini. Gerakan kargo merupakan gerakan yang secara umum terjadi di wilayah Papua-Melanesia dimasa lampau atau bahkan sampai kini pun paham ini masih tampak ada dalam sejumlah mitos yang diceriterakan sebagai cara pandang

beberapa kelompok masyarakat tertentu terhadap harapan-harapan tentang masa yang akan datang maupun entitas lain dari sebuah budaya diluar dirinya. konsep tentang kargo berhubungan dengan konsep-konsep kekuasaan, status kekayaan dan hidup yang lebih baik dalam dunia spiritual Melanesia. Ciri-ciri khas dalam kargoisme adalah penantian atau harapan akan terjadinya perubahan radikal dalam kehidupan sosial, ekonomi bahkan hal-hal yang berhubungan dengan tatanan alam semesta (Stelan,1989). Sebagai akibat dari perubahan tersebut maka akan ada hidup yang baru, suatu cara hidup yang baru, suatu dunia yang baru yang berpolakan hal-hal yang menurut kepercayaan sudah ada sebelumnya pada masa lampau yang pernah hilang dan akan dibawa kembali oleh kedatangan nenek moyang pada masa kini.

Nilai kebendaan (materialistis) merupakan tema pokok dalam gerakan-gerakan Kargo yang pernah terjadi di Papua. secara implisit, situasi saat ini dapat dipandang dalam kerangka mitologi mereka, kemiripan pola ceritera dengan mitologi mereka. Harapan bahwa perusahaan asing yang masuk merupakan sebuah jawaban dari penantian yang ada dalam mitologi mereka bahwa suatu saat akan datang 'zaman bahagia' yang di bawa oleh seorang leluhur atau keturunannya dari luar. Paham kargo tergambar dalam hasil wawancara dengan Bram Wakaburi seorang tokoh adat Teluk Bintuni beretnis Wamesa :

'sejarah perjalanan leluhur kami tidak lepas dari bangsa-bangsa lain di dunia, karena dahulu pusat dari segala sesuatu sebenarnya berada di sini (wilayah tehuk) kemudian menyebar ke seluruh dunia. Penduduk Jepang, China dan Eropa juga berasal dari sini (wilayah yang sering disebut informan berada di arah matahari terbit, bagian leher burung pulau Papua, sebuah gunung yang disebut Gunung Nabi atau Guri Tempat sacral bagi kelompok etnis di

wilayah Teluk Bintuni) Jadi sebenarnya sekarang penduduk yang berada di dunia berawal dari sini jadi kami tidak bisa menolak mereka karena mereka adalah bagian dari leluhur kami juga. suatu saat mereka akan kembali melihat kami sebagai bagian dari kami dan memberikan kami kehidupan yang lebih baik. Misalnya perusahaan-perusahaan yang datang. Seperti perusahaan migas yang sekarang beroperasi merupakan milik orang yahudi (menurut pendapat informan) mereka dulu adalah moyang kami yang pergi dan kemudian akan kembali memberikan kesejahteraan kepada kami kekayaan dan barang-barang berharga yang mereka miliki akan mereka bagikan kepada kami karena kami dan mereka memiliki leluhur yang sama. Rahasia-rahasia tentang pengetahuan dan kehidupan pun sebenarnya berasal dari sini milik leluhur kami, namun mereka pergi dan menjadi milik orang asing. Suatu saat mereka kembali kesini dan megajarkan rahasia-rahasia itu kepada kami'

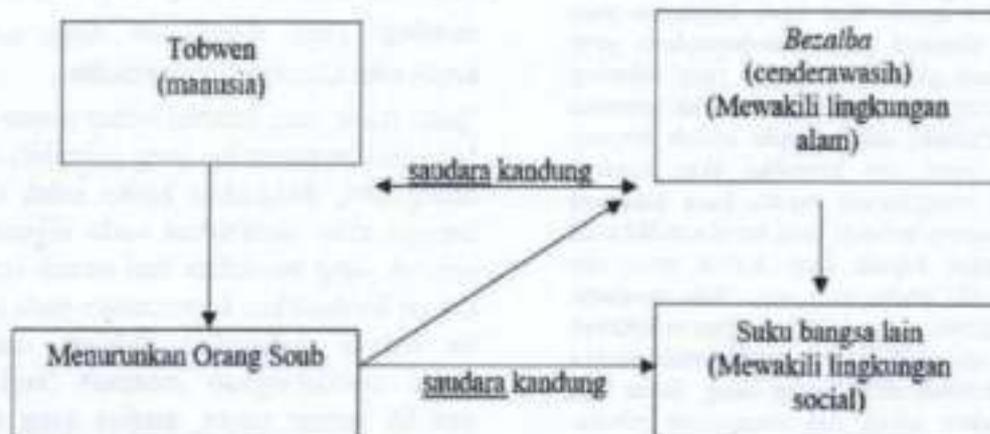
Mitologi orang Iraputu, Wamesa, Sebyar maupun suku-suku lain di Teluk Bintuni percaya bahwa tempat asal usul semua manusia di dunia ada di gunung Guri (nama lain dari Gunung Nabi) di tempat tersebut terdapat lubang-lubang di tanah, dari lubang-lubang inilah semua bangsa dengan berbagai bahasa di dunia berasal. Pada suatu masa terjadi banjir bandang (air Bah) yang menghanyutkan bangsa-bangsa tersebut, sebagian hanyut dan menempati wilayah-wilayah di sekitar Teluk Bintuni menjadi Suku-bangsa Papua dan sebagian besar hanyut menuju arah barat yang diyakini menjadi cikal bakal bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Bangsa-bangsa tersebut diyakini lebih maju dan suatu saat akan menginjakkan kaki kembali ketanah asal mereka member kemakmuran bagi saudara-saudara tua "Papua" mereka yang menjaga tempat tersebut.

Kisah lain yang menguatkan kemiripan paham Kargo Pada suku-suku asli di Teluk Bintuni juga dapat terwakili dari Mitologi mengenai asal muasal etnik sough,

khususnya kisah yang diwariskan turun-temurun oleh klen Iba, klen utama yang dianggap merupakan cikal bakal lahirnya klen-klen lain etnis sough . Berikut petikan mitologi yang diceritakan oleh seorang ketua adat klen Iba Hermanus Iba :

'pada masa yang lampau hidup seseorang Laki-laki bernama Iba yang memiliki dua orang istri, dikisahkan ketika salah satu istrinya akan melahirkan maka dibuatlah pondok yang berjauhan dari rumah induk hal ini berdasarkan kepercayaan pada saat itu bahwa melahirkan didalam rumah dapat mendatangkan musibah bagi si pemilik rumah maka, setelah sang istri melahirkan (anak kembar) leluhur Iba menunggu istri dan kedua anaknya untuk keluar dari pondok tersebut, namun setelah sekian lama menunggu, sang istri tidak kunjung keluar. Sehingga kecewalah leluhur Iba. Maka pergilah Ia meninggalkan mereka dengan menggunakan perahu menuju arah barat. Kedua anak ini, yang pertama bernama *Tobwen* dan anak kedua bernama *Bezaiba*. Kemudian kedua anak tersebut pergi mencari bapaknya (moyang Iba). Pencarian mereka sia-sia karena mereka tidak menemukannya, dalam pencarian itu anak kedua yang bernama *Bezaiba* berubah menjadi *Cenderawasih*. Anak pertama dipercaya menurunkan klen-klen etnis Sough dan anak kedua yang berubah menjadi *cenderawasih* ini menurut keyakinan orang sough dipercaya menurunkan bangsa-bangsa dari seberang seperti orang-orang Biak, Serui bangsa Melayu maupun bangsa dari Eropa. Suatu hari nanti keturunan *Bezaiba* dan ayahnya yang pergi menuju barat (moyang Iba) akan kembali untuk bertemu dengan keturunan *Tobwen* yaitu, orang sough yang mendiami tempat tersebut'





Bagan 2. Hubungan mitologi orang soub dengan lingkungan ekologis dan lingkungan sosial

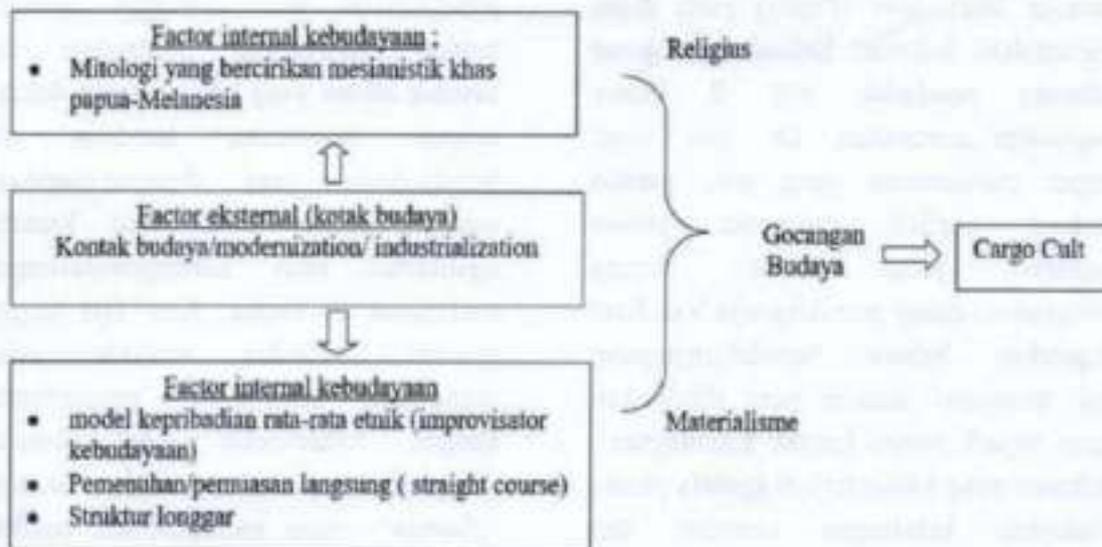
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa, respon penduduk asli atas perubahan yang terjadi menampakkan pola-perilaku yang menarik untuk di ulas, dengan munculnya sikap ambiguitas yang nampak dalam pola interaksi yang khas dengan factor eksternal diluar kebudayaannya. Karakter ini menegaskan bahwa sikap seseorang selalu tergantung pada kepentingannya. Dapat dikatakan bahwa sikap merupakan fungsi dari kepentingan, bila kepentingan berubah sikap pun akan berubah. Sikap ini menguatkan pendapat beberapa ahli sebelumnya yang memberikan penilaian pada karakteristik yang menjadi kekhasan yang dimiliki oleh etnis-etnis di Papua dimana Papua sebagai entitas etnik memiliki beragam ciri, baik fisik lingkungan alam maupun unsur-unsur kebudayaannya dan termanifestasi dalam tradisi. Keberagaman ini di satu sisi memiliki keunikan luar biasa, namun pada sisi lainnya karena keberagamannya menjadi sebuah entitas yang kurang memiliki ketahanan terhadap perubahan. Held 1951, mengatakan bahwa

sebagian besar kebudayaan di Papua bersifat 'longgar' Struktur yang longgar ini disebabkan oleh ciri-ciri orang papua pada umumnya 'improvisator kebudayaan' yaitu mengambil alih unsur-unsur kebudayaan dan menyatukannya kedalam kebudayaannya sendiri tanpa memikirkan untuk mengintegrasikannya kedalam unsur yang sudah ada dalam kebudayaannya secara menyeluruh. Pendapat Held mengenai 'kecenderungan pengambil-alihan unsur-unsur baru tanpa lebih dahulu mengintegrasikan dalam unsur yang sudah ada dalam kebudayaannya secara menyeluruh' memberi gambaran mengenai potensi munculnya distorsi antar unsur-unsur dalam kebudayaan itu sendiri. kekhawatiran ini mulai tampak di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di papua belakangan ini (khususnya di Teluk Bintuni), pengaruh antara factor eksternal (nilai baru) dan internal (struktur longgar) ini memiliki potensi dampak yang pernah diramalkan oleh seorang antropolog kebangsaan Belanda yang pernah menjadi

Gubernur Irian Jaya (Papua) pada masa pemerintahan kolonial Belanda mengenai ketahanan penduduk asli di Papua menghadapi perubahan. Dr. Van Baal. Dengan pengamatan yang jeli, pernah membuat analisis mengenai proses 'akulturasi yang keliru' (erring acculturation) dalam pemikirannya Van Baal mengatakan bahwa 'ketidak-mampuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan selama terjadi proses kontak kebudayaan'. Akulturasi yang keliru terjadi apabila proses kebudayaan kehilangan orientasi dan berkembang kearah yang merugikan, menjauhi sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kekeliruan ini dapat menyebabkan bahaya besar yang mengakibatkan terjadinya proses penyusutan kebudayaan (culture lost) dalam masyarakat tersebut. Proses ini mengakibatkan dalam konteks etnisitas, penduduk asli akan kehilangan makna dan pegangan hidup. Akan terjadi proses pemiskinan yang terutama pada pemiskinan kultural pada penduduk asli.

Banyak didapati sejumlah mitologi bernuansa mesianistik di masa lampau yang dapat menjadi dasar stimulus bagi kembalinya sebuah gerakan-gerakan kultus kargoisme di Papua masa kini, stimulus lainnya adalah, penduduk asli yang terombang-ambing oleh situasi yang tidak menentu sejumlah harapan-harapan yang tidak terjawab oleh modernisasi dan industrialisasi sangat rawan terhadap tumbuh kembalinya gerakan tersebut sebagai jawaban dari segala kekecewaan akibat permasalahan sosio-ekonomi, politik dan budaya yang tidak

terselesaikan dan dianggap menjadi bentuk penindasan, penjajahan dan ketidakadilan yang bertentangan dengan konsep kesetaraan, keadilan dan kebahagiaan yang diangan-angankan sebagai prinsip dasar dari karakter egalitarian khas kelompok-kelompok tradisional di Papua. Kini kita tinggal menanti stimulus terakhir yaitu, munculnya actor-aktor 'improvisator' dengan bakat-bakat alam tertentu mengambil peran sebagai seorang 'shaman' yang mereproduksi kembali aspek-aspek religiusitas local-tradisional yang sering kali di padu-padankan dalam nilai agama modern, gejala sinkrestisme ini merupakan 'rasionalisasi' sesuatu yang 'primitif' yang direproduksi kembali. Cara dan ciri improvisasi dalam budaya orang Papua justru menguatkan transisi kargoisme tradisional kedalam bentuk-bentuk yang baru yang memungkinkan diterima kembali dan memiliki daya dorong menggerakkan penduduk asli dan berakibat pada pecahnya gelombang besar gerakan cargo pada etnik-etnik asli di era modern yang pada puncaknya akan menunjukkan gejala 'cargomadness'. Gejala ini tidak hanya dilihat sebagai gerakan spiritual-materialisme dengan karakteristik tradisional saja namun termanifestasi dalam banyak wujud termasuk gerakan social (*social movement*) melalui perlawanan sosio-politik, gejala *adversary culture*, *navistic movement* etnik-etnik minoritas terhadap penguasa akibat ketimpangan yang terjadi dalam kontak-kontak kebudayaan yang mereka alami.



Bagan 3. Hubungan sebab-akibat factor eksternal dan internal munculnya gerakan kargo.

Mengenai kultus kargo ini, bila saya perbandingkan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia mengenai gejala-gejala ini juga tampak pada penduduk dengan etnis Melayu dalam dimensi perilaku psikologi dan perubahan masyarakat. J.M Potter menbaginya dalam tiga permasalahan yaitu (1) dimensi psikologi dan akulturasi (2) hubungan kesehatan jiwa dan perubahan kebudayaan (3) hubungan Psikologi dan Modernisasi. Ada sejumlah kesimpulan yang memberikan penekanan kepada fenomena kontak budaya (culture contact) selalu seiring dengan krisis social. Van Baal juga menanggapi situasi ini dengan analisis bahwa krsisis social ini muncul karena perubahan penyesuaian diri menyangkut dasar pandangan hidup asli yang harus dipaksa masuk dalam prinsip-prinsip baru dalam kehidupan mereka. (Van Baal 1949; Danandjaja, 1988:22).

Ada beberapa tulisan yang menarik perhatian saya untuk

diperbandingkan dengan gerakan Kargoisme di Papua misalnya, dalam artikel yang ditulis oleh P.M. van Wulften-palthe 'De Psychologie van de Amok (1941) mengenai Perilaku mengenai amok atau dapat dikategorikan sebagai *culture-bound syndrome* kemarahan yang distimulasi oleh factor-faktor budaya pada masyarakat melayu yaitu keadaan emosi yang sangat bergairah (manic) dan berkecenderungan untuk melukai orang yang ditemui secara acak. Kondisi ini umumnya dilakukan oleh orang yang mengalami depresi dimana orang-orang tersebut meninggalkan lingkungannya ke suatu tempat asing dan tak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya tersebut. Gambaran menarik juga ditulis oleh Hilfred mengenai *latah* (gangguan psikologis dimana seseorang suka meniru-niru perbuatan atau ucapan orang lain yang terjadi secara refleksi) Hilfred berkesimpulan bahwa kebudayaan Jawa digerakan oleh dua nilai dasar yaitu pada

norma sopan santun pergaulan dan kedua pada keselarasan masyarakat (harmoni). Yang membentuk kepribadian ideal orang Jawa. Hilfred mengatakan bahwa Latah adalah perilaku simbolis karena aspek budaya tersebut menekan keluarnya karakter-karakter agresif-ekspresif yang dimiliki oleh seorang individu Jawa. Nilai-nilai dasar kebudayaan Jawa secara tidak sengaja menjadi katalisator dalam penyimpangan kepribadian saat situasi krisis social dan perubahan terjadi dalam masyarakat. Hilfred menyimpulkan bahwa perilaku *latah* ini rupa-rupanya hanya terjadi pada orang-orang yang telah mengalami kontak budaya dan tinggal dilingkungan perkotaan termasuk mereka yang mengalami salah penyesuaian diri (maladjustment) dengan menjadi latah dapat dikatakan bahwa kebudayaan Jawa telah menyediakan seperangkat symptom perilaku kejiwaan yang telah diterima oleh masyarakat kepada penderitanya. *Latah* merupakan semacam simbol perlawanan 'terselubung' dan sebagai perbuatan simbolis, seorang penderita latah dapat mengungkapkan dilema kejiwaan akibat perubahan social-budaya dalam lingkungannya. (Danandjaja, 1988).

Walaupun masih cukup terbuka ruang perdebatan dalam hal ini, saya melihat ada pola yang sama terjadi pada gerakan mesianistik pada umumnya, kajian-kajian psikologi budaya pada suku bangsa Melayu dan Jawa maupun pada tipikal khusus kultus kargo yang hanya terdapat di Melanesia. Munculya kultus kargo selalu diawali dengan situasi krisis akibat pemolaan (patterning) dalam sebuah kebudayaan dibarengi dengan perubahan-perubahan mendasar struktur social yang

terjadi secara cepat yang bersumber pada kontak-kontak budaya dimana salah satu kebudayaan minoritas (inferior) berinteraksi dengan budaya lain yang memiliki suprastruktur dan infrastruktur lebih perkasa dalam sistem kebudayaannya. Sikap inferioritas ini memunculkan sebuah *survive mechanism* dalam kebudayaan tersebut. Dalam aspek religius menghadirkan sejumlah mitos, dengan mitos orang berusaha memperoleh pegangan atas teka-teki kelahiran, keberadaan, hidup bermasyarakat, tempatnya di dunia, dan atas hari depannya. Dari mitos mereka mendapatkan makna kehidupan mereka (Van Baal 1991:12). melalui seperangkat sistem dalam kebudayaan asli yang telah tersedia lewat mitologi tersebut atau harapan-harapan yang di ciptakan oleh tokoh-tokoh sentral tertentu, seorang *shaman* yang memiliki relasi dengan karakteristik spiritualis yang menjadi kekhasan dari kebudayaan Melanesia, mejadi penyangga (buffer) psikis komunal dalam menghadapi gejolak budaya dalam kontak budaya yang terjadi dengan munculnya bentuk 'gerakan-gerakan spiritual-Materialisme tetapi disisi lain bila kontak budaya tersebut telah mencapai puncak tekanan maka, akan termanifestasi dalam bentuk perlawanan akibat depresi yang dihadapi komunal akibat superioritasnya kebudayaan yang masuk tersebut. Faham ini dapat dengan cepat meluas menjadi gerakan-gerakan kultus kargo pada kultur area yang sama karena factor internal dalam kebudayaan itu sendiri yang memiliki kemiripan karakteristik melalui sistem kepercayaan asli (mitologi) mereka dan factor eksternal yaitu, gagalnya kontak budaya dengan tidak tercapainya tujuan-tujuan yang

menjadi ukuran-ukuran ideal penduduk asli sesuai dengan apa yang pernah diceriterakan oleh dongeng suci mereka.

#### CONCLUTION: TRYING TO UNDERSTAND INDIGENOUS PEOPLE IN THEIR CONTEXT

Kisah mitologi dengan karakter religius-materialistis yang mewakili dunia sakral dan profan yang menjadi dasar paham cargo cult disandingkan dengan modernisasi industrialisasi di Teluk Bintuni memang bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kargoisme memunculkan harapan-harapan baru perubahan bersamaan dengan masuknya investor dan "peradaban lain" yang menyertainya. Ada harapan besar yang dimiliki komunitas asli yang bersandar pada mitologi mereka mengenai perubahan tersebut Namun tanpa disadari mereka pun mengalami krisis budaya dalam usaha untuk menyesuaikan diri mereka dalam sebuah 'zaman baru'. Kapitalisasi sumber-sumber daya alam, kontak-kontak kebudayaan yang terjadi memberikan pengaruh pada aspek-aspek kebudayaan setempat yang bermuara pada ketahanan nilai-nilai local yang dipengaruhi oleh bentuk rasionalisasi antara kepentingan-kepentingan ekonomi dan sitem nilai baru. Situasi ini juga di perkuat dengan sebagian besar kebudayaan dipapua bersifat 'longgar' Struktur yang longgar ini disebabkan oleh ciri-ciri kepribadian orang papua pada umumnya 'improvisator kebudayaan' yaitu mengambil alih unsur-unsur kebudayaan dan menyatukannya kedalam kebudayaannya sendiri tanpa memikirkan untuk mengintegrasikannya kedalam unsur yang sudah ada dalam kebudayaannya secara menyeluruh. Proses transisi kebudayaan asli menghadapi perubahan yang terjadi mengalami kondisi

dimana sasaran-sasaran perubahan yang diinginkan mengarah pada akulturasi yang keliru "Erring aculturasi" juga 'Erring modernization', dis-orientasi akibat modernisasi, menuju sebuah konsekwensi yang merugikan penduduk asli. Dalam sudut pandang ini industrialisasi dan kapitalisasi sumberdaya alam dan migrasi masuk telah memunculkan gelombang besar yang mengurai sendi-sendi kehidupan tradisional penduduk asli yang telah dirancang sempurna ribuan tahun dalam rangka startegi adaptasi yang terbangun dalam relasi social maupun relasi dengan lingkungan alamnya. Penduduk asli mengalami involusi kebudayaan yang merengut mereka dari institusi-institusi tradisionalnya, lingkungan alamnya juga merengut mereka dari rasa tenteram kosmologinya yang diperoleh melalui pandangan-pandangan mitologi mereka akan 'suatu zaman bahagia' yang nampaknya menimbulkan rentetan akumulasi kekecewaan. Peter Worsley (1957) yang menulis tentang gerakan mesianistik dan millenarian, sering timbulnya gerakan-gerakan seperti ini di Kawasan Melanesia menurut Worsley dapat disebabkan adanya kehilangan material yang dianggap pernah mereka miliki dimasa lalu yang dirasa merugikan. Adakalanya perilaku ini timbul kerana munculya kebutuhan baru yang dirasakan, atau keinginan keinginan baru ini ingin dipenuhi, tetapi tidak dapat tercapai. Karakter-karakter budaya seperti ini, memunculkan tantangan namun juga harapan bahwa ada sebuah celah kemungkinan dan peluang dalam membangun kesejahteraan masyarakat asli berlandaskan makna kesejahteraan yang ditinjau dalam sudut pandang mereka.

Harapan tentang kedatangan Kargo yang dapat menyejahterakan seiring dengan pemikiran nativitis-milennarisme dalam mempertahankan kelestarian kebudayaan-kebudayaan asli menghadapi perubahan zaman memang akan sulit sekali terjawab, industrialisasi dan modernisasi adalah sebuah keniscayaan yang sulit terbendung, terus merambah keseluruh pelosok negeri. Namun dengan usaha terus-menerus untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam memahami aspek-aspek kebudayaan komunitas-komunitas asli ini dapat mejadi pintu masuk antara kebudayaan asli yang menjadi pegangan hidup mereka dengan nilai-nilai modernisme. Proses-proses yang tepat akan menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan bagi mereka dan memberikan peluang bagi jajan baru (*social inventiveness*) yang *fair* dalam memahami kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan mereka. proses dan adaptasi tanpa henti niscaya dapat menjadi katalisator dalam meyelaraskan dua karakteristik budaya yang berbeda tanpa menindas kelompok-

## NOTES

<sup>1</sup> 'Kabupaten Teluk Bintuni', *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Jilid 5 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005),

hlm. 679

<sup>2</sup> Migrasi masuk melalui program transmigrasi sebagian besar adalah orang-orang kelompok etnik Melayu terutama yang akan dibahas disini adalah etnis-etnis yang berasal dari Pulau Jawa karena pengaruh mereka cukup signifikan atas perubahan-perubahan social-ekonomi dan demografi yang terjadi : Kelompok etnik Jawa masuk ke papua melalui program pemerintah transmigrasi Diperkirakan bahwa sekitar 75.200 keluarga (sumale,1994) telah dipindahkan ke papua, dan mencapai puncaknya dimasa pemerintahan Soeharto yang mendeklarasikan program untuk memindahkan

kelompok minoritas dengan serpihan-serpihan kecil kebudayaan mereka.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Kami ungkapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat adat Teluk Bintuni khususnya, informan kunci di beberapa kampung wilayah Distrik Babo. Informan kunci di Kampung Tanah Merah Baru, Kampung Saengga, Kampung Tofoi, Kampung Weriagar. Tak lupa penghargaan kami kepada masyarakat adat Mbaham tiri, Mbaham poitit (Iha), Raja Paus-Paus dan penduduk Pulau Arguni Distrik Kokas Kabupaten Fak-fak, terima kasih atas keramah-tamahan dan kebaikan kalian. Akhirnya kami ucapkan terimakasih pada pihak perusahaan BP-LNG TANGGUH Bintuni atas kerjasamanya yang telah dilakukan dalam penelitian yang dilakukan pada pertengahan tahun 2013 dengan judul '*Indigenous People Of the Bintuni Bay*'.

---

sejumlah besar masyarakat dari daerah berpenduduk padat dan miskin (Jawa, Madura dan Bali) kedaerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk rendah. Kelompok etnis ini mendiami wilayah tersendiri sering disebut satuan pemukiman (SP) didalamnya termasuk tanah pertanian yang menyebar di wilayah Teluk Bintuni ada dua cara bagaimana migrasi ini masuk, transmigrasi yang diikut oleh keluarga inti dan yang kedua adalah melalui program yang sering disebut *bedhol desa* yang dimaksud dengan *bedhol desa* disini adalah memindahkan satu desa beserta perangkatnya dengan maksud terbentuknya kesatuan-kesatuan sosial community yang cukup kuat akan mempermudah mereka beradaptasi di tempat yang baru. Program ini banyak mengundang kritik, antara lain transmigrasi dilakukan tanpa menghormati hak penduduk asli akan tanah adat mereka, karena transmigrasi adalah program nasional, ketika suatu daerah dianggap cocok untuk lahan transmigrasi, maka pemilik tanah asli itu tidak punya pilihan

kecuali menyerah dengan sedikit kompensasi (Aditjondro,1985). Transmigrasi kemudian dianggap sebagai bentuk Jawanisasi dan kolonisasi terhadap pulau-pulau diluar Jawa (Assman,1990). Bidang pekerjaan Etnis jawa menyebar luas dalam berbagai aspek kehidupan dari mulai usaha perdagangan kecil dan menengah, usaha pelayanan jasa dan terutama bergerak disektor pertanian, suplai hasil pertanian ke perusahaan yang ada biasanya diperoleh dari kelompok-kelompok tani dari Jawa.

<sup>3</sup> Kelompok etnik bugis, makasar dan toraja dari sulawesi selatan dan etnis buton dan muna sulawesi tenggara. kelompok etnik ini umumnya masuk tanpa melalui program transmigrasi namun masuk melalui jaringan-jaringan perniagaan keluarga (kekerabatan). ketika satu keluarga telah sukses di satu wilayah tertentu maka, dikemudian hari bila ada peluang usaha lainnya maka jaringan kekerabatan ini digunakan untuk meluaskan usaha bisnis mereka atas dasar ikatan-ikatan kedaerahan, keluarga, teman sekampung untuk menguatkan usaha ekonomi mereka. ikatan-ikatan kedaerahan ini juga menjadi faktor penyangga didaerah perantauan, sebuah bentuk strategi adaptasi menghadapi persaingan ekonomi dan hubungan antar etnis yang terjadi. Usaha mereka utamanya disektor perdagangan dan usaha perikanan, pemukiman mereka terkonsentrasi di lingkungan pasar atau diwilayah pesisir dalam menjalankan usaha perikanan mereka.

<sup>4</sup> Dalam hutan terdapat sumber-sumber penting bagi masyarakat, termasuk kayu, buah-buahan dan tanaman-tanaman khusus yang digunakan untuk kepentingan pengobatan tradisional atau ritus-ritus tertentu yang berkaitan dengan sistem religius-magis mereka.

<sup>5</sup> Kondisi ini dapat kita saksikan di kampung Tanah Merah Baru dan Saengga, dimana BP (British Petroleum Memindahkan seluruh penduduk sumuri yang awalnya mendiami kampung lama mereka ke kampung baru tersebut.

<sup>6</sup> Belakangan ini gejala modernisasi tampak lewat diferensiasi structural antara lain diperkenalkannya banyak sistem kelembagaan modern, ada dua kelembagaan yang cukup mempengaruhi sistem politik tradisional masyarakat asli yaitu pembentukan Lembaga Musyawarah Adat (LMA) dan sistem pemerintahan kampung yang lebih dulu diterapkan melalui undang-undang pemerintahan desa 1999

<sup>7</sup> Petuanan sering digunakan pada masyarakat di bintuni Maupun wilayah Fak-fak, sebenarnya istilah ini digunakan untuk menyebutkan wilayah teritorial tertentu yang dikuasai oleh klen-klen setempat, dalam rangka penguasaan sumber daya didalamnya. Istilah ini sepertinya diadopsi oleh penduduk asli dari interaksi mereka dengan penduduk di daerah Maluku.

<sup>8</sup> Dalam kasus lain yang terjadi beberapa waktu lalu, seorang pemuka adat dari sebuah klen secara diam-diam mendatangkan pekerja-pekerja seks non Papua

yang banyak terdapat di Ibukota bituni pekerja seks ini ditempatkan di perahu-perahu yang ditambatkan di dermaga kampung. Transaksi seks sebagian besar diminati oleh pemuda-pemuda local dan di lakukan di malam hari, namun aktivitas ini segera berhenti setelah diketahui dan mengakibatkan kericuhan oleh kemarahan kaum ibu klen-klen setempat dan kampung tetangga dengan menyerang lokasi tersebut.

## REFERENCES

- Baal, J van.1961. *Research in Western New Guinea: An Assessment of current -need*, BIC 4: 33-39.
- Baal,J van, Galis.K.W, Koentjaraningrat.1983. *West Irian Bibliography, Series KITLV*
- Balandier,G.1996. *Antropologi Politik*. Penterjemah Y. Budisantoso, Jakarta: CN Rajawali
- Boelaars, J. 1987. *Sistem Nilai Budaya Berbagai Suku Irian Jaya Dalam Kaitanya dengan Pembangunan Dalam* Manuel Kaisiepo, Ishadi S.K, Abdul Razak (eds), *Pembangunan Masyarakat Pedalaman Irian jaya*.
- Danandjaja,J.1988. *Antropologi Psikologi, Teori Metode dan Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press
- Kabupaten Teluk Bintuni.2005, *Profil Daerah kabupaten Kota*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kluckhohn,C. 1952. *Values and value Orientation In The Theory of Action: An Exploration in Difinition and Classification* dalam Talcot Parson dan Edward E. Shills (eds), *Toward a General Theory of Action*, Cambridge: Havard University Press.

---

Lee, Everett, S. 1979. Suatu Teori Migrasi, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Yogyakarta; Universitas Gajah Mada.

Lounela, A. 2002. Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Dalam Lounela (ed) *Menegosiasikan Hak-Hak Atas Sumber Daya Alam di Indonesia: Desentralisasi di Wonosobo*. Yogyakarta: Insist Press.

Liliweri, A. 2018. Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antar Budaya. Jakarta: Pramedia Group

Schoorl, P. 2001. Belanda di Irian Jaya, Amtenar dimasa Penih Gejolak 1945-1962, Penerjemah: RD. Soekadijo, Jakarta: Garba Budaya

Stelan, G.J. 1989. Kargoisme di Melanesia, Suatu Studi Tentang Sejarah dan Teologi Kultus Kargo. Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya

Suara perempuan papua. 2008. Dari Kampung ke kampung, Perjalanan Jurnalistik Suara Perempuan Papua. Jayapura : Penerbit Suara Perempuan Papua.

Sumule, A. 2006. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, *Studi Realitas social dan Perspektif Politis*. Jakarta : PT Pustaka Sinar Harapan.

Worsley, P. 1957. *The Trumpet Shall Sound*. London